

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* (2004). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah.* (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* (2015). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* (2015). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2007). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.* (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan.* (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2011). Jakarta

- _____, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. (2010). Jakarta.
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2008). Bandung
- _____, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016. *Tentang Bantuan Keuangan Dukungan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. (2016). Bandung
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol.11 No.1, hlm : 68-79.
- Amrozi, A.I.(2013).*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.2 No.9
- Ernawati. (2017). *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, W. (2010). *Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.3 No.1, hlm.29-51.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4, Salemba Empat.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hasan, M., dan Nurhidayat, Y. (2016). *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan *The Ford Foundation*.

- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012*. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah*. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lestari, A. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, e-ISSN : 2502-5171, Vol.1 No.2.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* . Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marizka, R.(2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat 2006-2011*. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*. ISSN 1979-7338. Vol. 1 No.2.
- Naganathan, M. & Sivagnanam, J.K. (2000). *Federal transfer and the tax effort of the states in india*. *Indian Economic Journal*. Vol. 47 No. 04. University of Madras.hlm 252-281.
- Nurhasanah & Maria. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vo. 1 No. 1.
- Novalistia, L.R. (2016). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. *Journal Of Accounting*. Vol.02 No.02. Universitas Pandanaran Semarang. hlm 1 – 25.
- Sekaran, Uma. (2003), *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach*, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisni*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

- Susanti, D.B., Rahayu. S, Yudowati, S.P. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. e-Proceeding of Management : Vol.3 No.3.
- Susanto, E.D., & Murtini, H. (2015). *Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah*. Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765, Vol.4.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, hlm: 88-99.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Cetakan Pertama. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2016). *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol.24 No.1, hlm : 25-34.
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Edisi 1. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pojok satu.(2017). Berdasarkan Rasio PAD, Jabar Miliki Kemandirian Keuangan Tinggi. Diakses 24 april 2018, dari <http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/08/16/berdasarkan-rasio-pad-jabar-miliki-kemandirian-keuangan-tinggi/2/>
- Wong, D.J. (2004). The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On Local Government Revenue Capacity. *J. Of Public Budgeting & Financial Management*, 16, 16 (3), 413-423.
- Zelmiyanti. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). *JRAK*. Vol.7 No.1